

BAB II

Tinjauan Pustaka

Dalam bab II akan dijabarkan landasan teori yang sesuai dengan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori revolusi, gerakan sosial, gerakan mahasiswa, mahasiswa, masyarakat, pendidikan, dan universitas.

A. Analisis Teori

A. 1. Revolusi

Kebebasan merupakan salah satu nilai tertinggi dalam diri manusia. Dalam paham eksistensialisme, Sartre menyatakan bahwa *"l'homme est condamné à être libre"* (<http://effingo.be/documents/jean-paul-sartre-philosophie-de-la-liberte/>). Bapak eksistensialisme yang menolak Nobel Sastra tersebut berpikir bahwa manusia dikutuk untuk bebas. Manusia harus menyadari bahwa menjadi manusia itu berarti menjadi manusia bebas, dalam artian bebas untuk menjadi manusia kreatif, bebas mengambil keputusan, menjalankan aksi, dan menjadi subjek yang memungkinkan segala sesuatu yang baru.

Seirama dengan Sartre, filsuf Prancis penganut paham postmodernisme, Foucault dalam Sheehan (2003:37) mengulas bahwa manusia memandang dirinya sendiri sebagai subyek adalah sebuah proses historis. Dengan kata lain, Foucault mengungkapkan bahwa

adalah penting bagi manusia untuk menjadi aktor pengubah dunia yang bebas dari kesewenang-wenangan (penindasan) dan ketidakadilan. Untuk itu manusia tidak dapat tidak membutuhkan kebebasan. Dengan kebebasanlah manusia menjadi “mengada” di dalam kehidupan dan memberikan penyadaran manusia lainnya.

Pemikiran kedua filsuf lulusan dari *Ecole Normale Supérieure* tersebut searah dengan Nietzsche dalam Sheehan (2003:82) yang berpandangan bahwa tuhan sudah mati. Maksud seruan kontroversial dari pencetus paham nihilisme itu adalah bahwa menjadi manusia bukanlah menjadi manusia yang pasrah dan patuh pada nilai-nilai normatif yang justru membuat manusia itu sendiri “membeku” dan “tidur” dalam kreativitas, baik dalam cara berpikir maupun bertindak. Menurut Nietzsche, manusia harus bebas dalam menciptakan dunia dan memberinya nilai.

Dalam kaitannya dengan “Mei Merah” di Prancis, salah satu penyebab letupan-letupan emosional di Prancis adalah masih dianutnya nilai-nilai yang dianggap usang dan terkesan karikatif yang dipaksakan oleh sistem lama yang berdiri kokoh di Prancis. Hal tersebut dirasakan oleh masyarakat baru (masyarakat radikal) sebagai bentuk “pengempesan” kebebasan di Prancis. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah caranya menghidupkan kembali kebebasan yang dikerdilkan?. Jika tidak mungkin lagi dengan jalan diplomasi, untuk menghidupkan kembali kebebasan diperlukan adanya suatu alat

pendobrak guna membongkar bangunan ketidakadilan sehingga tercipta masyarakat baru yang mengedepankan prinsip kebebasan. Salah satu usaha besar untuk mencapai semua itu adalah revolusi. Berikut analisa mengenai revolusi dari perspektif yang beragam baik dari para ahli maupun dari pelaku revolusi.

Freire (2000:15) menguraikan bahwa revolusi mengubah situasi penindasan dengan cara membangkitkan proses pembebasan, harus menghadapi gejala ini. Banyak kaum tertindas yang langsung atau tidak langsung berperan serta dalam revolusi berniat –dikondisikan oleh mitos-mitos penguasa terdahulu– menjadikan revolusi tersebut sebagai ajang perjuangan pribadi mereka. Bayangan kaum penindas mereka sebelumnya masih melekat dalam diri mereka.

Pernyataan tokoh pedagogik “melek” huruf asal Brazil bagian timur laut (daerah miskin) tersebut mengisyaratkan bahwa dalam revolusi, kebebasan merupakan salah satu tujuan yang wajib dicapai. Karena dalam situasi bebas, kaum tertindas (masyarakat) dapat berjuang menuntut hak asasinya sebagai manusia kepada kaum penindas (pemerintah yang tidak adil). Begitu pentingnya prinsip kebebasan, karena kebebasanlah yang mengantar masyarakat agar tidak lagi terkungkung dan kembali ke posisi naturalnya sebagai manusia yang manusiawi.

Secara umum, cendekiawan besar Indonesia, Soedjatmoko (2001:200) memberikan gambaran bahwa revolusi kita pada hakikatnya ialah suatu jangkauan untuk menentukan nasib kita sendiri sepanjang

jangkauan itu timbul dari keinginan untuk turut serta secara aktif dalam sejarah dan lahir dari kepercayaan bahwa kita sanggup membangkitkan kekuatan-kekuatan dalam kita sendiri yang akan memungkinkan kita menempatkan diri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan demikian, revolusi merupakan suatu usaha secara aktif yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa tersebut sehingga mampu bersaing dengan negara lain.

Sedangkan Kaya (2007:39) mendeskripsikan revolusi sebagai berikut,

“Seule une révolution peut dans un premier temps changer les règles du jeu. Par la suite, tout dépend des mécanismes de socialisation qui seront instaurés, pour transformer en profondeur la psychologie de tous les acteurs sociaux. C’est ici que l’initiation commence à jouer pleinement son rôle. En effet, il est impossible de déclencher un mouvement révolutionnaire sans projet, et sans idéologie. On peut croire LENINE qui écrivait en tant que professionnel de la Révolution que : “il n’y a pas de mouvement révolutionnaire, sans une théorie révolutionnaire.”

Jadi revolusi awalnya dapat mengubah “aturan permainan” (peraturan baru). Setelah itu, tergantung mekanisme sosialisasi yang akan dibentuk secara mendasar untuk mengubah mental semua pelaku sosial. Dari sinilah inisiasi mulai memainkan peran penuh. Karena hal itu juga ditegaskan oleh Lenin yang mengatakan bahwa revolusi tidak akan terjadi tanpa adanya teori revolusi.

Lebih jelas lagi, Tocqueville (2005:245) mencatat bahwa ketika revolusi pecah, bagian dari pemerintah, sekalipun menempati posisi bawahan akan merasakannya. Setiap warga terus menerus sadar akan

keberadaannya dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga dimana pun, jatuh ke dalam keadaan kacau balau. Disebutkan bahwa revolusi memusatkan administrasi publik dan pemerintahan sebagai pusat perubahan karena administrasi publik mencerminkan kekuasaan pemerintah dan mempengaruhi kehidupan masyarakat umum.

Sementara itu, Soekarno dalam Adam (2003:401) menegaskan bahwa revolusi adalah pengebolan dan penanaman. Bung karno menambahkan dalam Adam (2003:420) menambahkan bahwa revolusi yang benar-benar revolusi adalah satu ritme yaitu antara tenaga-tenaga pengebolan dan pembinaan. Jadi jelaslah bahwa revolusi mempunyai akibat tidak selalu merusak tetapi juga membangun, artinya dengan revolusi suatu tatanan masyarakat baru diharapkan dapat dibangun secara lebih baik. Dalam proses revolusi, sebagian besar pelaku revolusi menggulirkan keadaan revolusioner dengan tempo yang cepat. Mengebol dan membangun kembali bangunan politik adalah ciri dari suatu revolusi, dan mengebol artinya harus dengan kekuatan tenaga dan pikiran dengan kekerasan bukan dengan diplomasi.

Perlu diperhatikan bahwa dalam revolusi, motivasi manusia itu penting, karena manusialah yang menciptakan peristiwa, termasuk revolusi. Maka sebenarnya revolusi bukan datang dengan sendirinya melainkan revolusi adalah kejadian besar yang diciptakan manusia. Ibarat suatu penyakit, dalam revolusi, terdapat gejala-gejala yang menandai

adanya tanda yang menunjukkan revolusi akan terjadi. Seperti yang dijelaskan oleh Prawironegoro sebagai berikut :

Diungkapkan oleh Prawironegoro (2007:89) bahwa pecahnya revolusi itu ditandai dengan beberapa hal, yaitu : 1). Massa rakyat sudah tidak puas atau tidak mau dengan keadaan yang lama yang sedang berlangsung. 2). Massa rakyat sudah berani dan sudah bertindak menentang dan melawan keadaan itu baik secara bersama. Singkatnya, revolusi terjadi akibat masyarakat yang tidak lagi percaya akan pemerintah. Problematika-problematika sosial yang terakumulasi dan mengendap di dalam tubuh masyarakat dan akhirnya meletus menjadi revolusi. Revolusi selalu dilakukan oleh kaum masyarakat bawah secara bersama-sama mendobrak tatanan lama. Revolusi ini didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat dan biasanya di dalam gelombang massa terdapat pemimpin-pemimpin revolusi yang menonjol dengan gagah berani dan lantang meneriakkan prinsip kebebasan sosial.

Tidak dipungkiri bahwa seperti halnya revolusi-revolusi di negara-negara lain, Revolusi Prancis Mei 1789 tentu memiliki tujuan yang baik yaitu perubahan. Namun di sisi lain revolusi biasanya dilingkupi oleh atmosfer yang penuh dengan kekerasan, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Hal inilah yang menguras perhatian Mahatma Gandhi. Gandhi dalam Sheehan (2003:121-122) memiliki pandangan yang berbeda, dengan tegas aktivis pembebasan India itu menyerukan bahwa dalam hal pembangkangan (revolusi) terdapat gerakan alternatif non-kekerasan

yaitu doktrin *Ahimsa* (anti kekerasan) dan dengan aksi langsung yang mengutamakan prinsip *satyagraha*. *Satyagraha* sendiri memiliki arti kebenaran dan kekuatan.

Dalam fenomena sosial luar biasa seperti revolusi, kekerasan ibarat bumbu yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah tujuan revolusi. Ibarat Karl Marx dan Friedrich Engels yang saling mendukung dalam penulisan Manifesto Komunis, begitu pulalah hubungan “kekerabatan” antara kekerasan dan revolusi. Fanon dalam Varma (2007:453) menggarisbawahi bahwa kekerasan revolusioner merupakan suatu alat untuk mencapai penyelesaian. Lebih lanjut Ranjabar (2008:33) memberikan gambaran bahwa suatu revolusi dapat berlangsung dengan didahului oleh suatu kekerasan (pemberontakan) yang kemudian menjelma menjadi revolusi. Terlebih lagi Rush dan Althoff (2008:156) percaya bahwa kekerasan sering merupakan upaya terakhir dari mereka yang dalam keadaan berputus asa. Jadi jelaslah bahwa pada umumnya revolusi didahului oleh adanya ketidakpuasan dari golongan-golongan tertentu dan penggunaan kekuatan pedang (kekerasan) sangatlah mungkin mengingat revolusi bukanlah kejadian main-main.

Sejalan dengan itu, dalam pandangan Luxemburg (2000:125) kekuatan revolusioner adalah cara yang lebih cepat serta lebih radikal. Secara umum, orang dalam hal ini bisa saja mengatakan bahwa cara revolusioner (selalu dalam makna revolusi dengan kekerasan) melakukan kerja yang lebih cepat sejauh ia berkaitan dengan upaya menyingkirkan

rintangan-rintangan yang ditempatkan oleh suatu minoritas yang memiliki privilese di tengah jalan menuju kemajuan sosial. Dengan perkataan lain, revolusi menurut Luxemburg adalah usaha radikal dan fundamental yang dilakukan secara cepat dengan tujuan untuk kemajuan. Namun revolusi itu tidak mungkin tidak menggunakan kekerasan.

Selanjutnya, penjelasan Gurr dalam Skocpol (1991:6) sepertinya mempertegas dimana “posisi” sebenarnya revolusi kaitannya dengan kekerasan. Gurr menggolongkan revolusi sebagai kekerasan politik. Menurutnya revolusi atau kekerasan politik adalah semua serangan kolektif dalam suatu komunitas politik terhadap rezim politik, para aktor politiknya termasuk kelompok-kelompok politik yang bersaing, maupun para pejabat atau kebijakan-kebijakannya. Konsep itu menggambarkan adanya seperangkat peristiwa, penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan secara bersama. Konsep itu termasuk revolusi, perang gerilya, kudeta, pemberontakan, dan kerusuhan.

Dengan kata lain, revolusi terjadi ketika banyak anggota masyarakat marah, khususnya jika kondisi praktis dan kondisi budaya yang ada merangsang terjadinya agresi terhadap sasaran-sasaran politik. Penyebab utama kekerasan politik pada mulanya adalah berkembangnya ketidakpuasan, politisasi ketidakpuasan itu, dan akhirnya aktualisasinya dalam aksi kekerasan terhadap sasaran dan aktor-aktor politik. Kemarahan itu terjadi apabila terbentuk kondisi perasaan yang tidak

sesuai antara harapan dan realitas. Dapat disimpulkan menurut Gurr, revolusi sosial merupakan kekerasan politik.

Proses pergantian politik atau pemerintahan oleh revolusi juga dipaparkan oleh Prawironegoro (2007:89) yang mendefinisikan bahwa revolusi itu adalah perlawanan besar dan menyeluruh dari massa rakyat terhadap kekuasaan dan kelas atau pemerintah lama yang proses kematangannya dimulai dari perlawanan-perlawanan yang kecil-kecil dan terpisah-pisah. Revolusi selalu berlangsung dengan perlawanan dan kekerasan. Tidak ada revolusi yang berlangsung secara damai.

Jadi revolusi ialah perebutan dan penggantian kekuasaan dari kelas lama (penguasa lama) oleh dan kepada kelas baru yang lebih maju. Atau dapat diartikan bahwa revolusi ialah penjungkirbalikan kekuasaan politik lama dan dibangunnya kekuasaan politik baru. Revolusi bersifat kekerasan dengan melibatkan kekuatan masyarakat karena kekuasaan lama mempertahankan diri untuk dihancurkan oleh kekuatan baru, tidak ada kekuasaan politik lama yang bersedia menyerahkan kekuasaannya dengan sukarela kepada kekuatan politik baru yang menentangnya, maka revolusi bersifat kekerasan.

Perspektif tentang revolusi yang ditawarkan oleh Prawironegoro tampaknya didukung penuh oleh Zedong dalam Sulastomo (2008:259) yang meyakini bahwa revolusi bukanlah sebuah pesta makan malam, atau menulis sebuah esai, atau melukis sebuah lukisan, atau merajut, revolusi tidak dapat dilakukan begitu njlimet, begitu rileks, begitu sopan/lunak, baik

hati. Sebuah revolusi adalah sebuah kebangkitan, suatu tindakan yang disertai kekerasan, di mana satu kelas (masyarakat) menjatuhkan kelas (masyarakat) yang lain.

Dari pandangan Pemimpin revolusioner China tersebut menegaskan bahwa revolusi ditandai dengan penggulingan kekuasaan dan sering berdarah-darah akibat konflik kekerasan yang ditimbulkan antara dua kekuatan yang bertahan dan berusaha saling menjatuhkan. Revolusi merupakan dinamika sosial masyarakat yang berjalan tidak lamban dengan tuntutan yang jelas.

Tidak hanya perubahan di bidang politik, revolusi juga membidik perubahan-perubahan dalam aspek lainnya. Diutarakan oleh Ranjabar (2008:46) bahwa banyak revolusi yang terjadi tak lebih dari sekedar penggantian penguasa belaka tetapi banyak pula revolusi yang telah mempengaruhi perubahan radikal dalam struktur sosial dan kehidupan sosial bangsa yang mengalaminya. Pastinya, revolusi satu bentuk kekerasan yang dapat mempengaruhi perubahan radikal atau perubahan yang terjadi mungkin kecil-kecilan atau besar-besaran. Artinya revolusi juga membawa perubahan-perubahan yang dalam kehidupan sosial masyarakat seperti di bidang pendidikan dan juga di bidang sistem nilai sosial.

Hal tersebut sesuai dengan pandangan Kartodirdjo dalam Suraputra (1991:1) yang berpendirian bahwa timbulnya berbagai gambaran sejarah tentang suatu gejala sejarah luar biasa seperti revolusi

adalah sangat wajar, tidak lain karena interpretasi dari sudut penglihatan tertentu menyoroti aspek-aspek, dimensi-dimensi ataupun faktor-faktor tertentu pula. Maka revolusi merupakan suatu fenomena yang jarang terjadi dan dianggap sebagai gejala sosial yang luar biasa. Hal ini dikarenakan karakter revolusi yang mendobrak berbagai sudut aspek kehidupan. Revolusi dianggap sebagai mesin perubahan yang menyoroti perubahan-perubahan sosial budaya, pendidikan dan politik.

Penekanan Kartodidjo tentang revolusi dan pengaruhnya, tidak bisa tidak dikatakan sepaham dengan Ash dalam Dahrendorf (1992:5) yang meyakini bahwa pada akhirnya berbagai perubahan itu bermuara pada delegitimasi seluruh kelas penguasa dan penggantian sebagian besar anggota inti kelas tersebut, maupun transformasi konstitusional dengan berbagai akibat yang luas jangkauannya.

Keyakinan Ash membuka cakrawala pemahaman bahwa inti dari persoalan revolusi adalah pengaruhnya terhadap lahirnya sebuah transformasi. Revolusi sungguh-sungguh akan bersifat revolusioner, jika ia harus merupakan suatu penjungkirbalikan dan pendobrakan tidak hanya kekuasaan tetapi juga segala nilai lama sampai ke akar-akarnya. Di atas puing-puing tatanan yang lama itulah akan dibangun suatu tatanan yang sama sekali baru. Revolusi sejati merupakan matinya nilai-nilai lama dan lahirnya nilai-nilai baru. Nilai-nilai lama dianggap tidak lagi sesuai dengan tatanan masyarakat baru yang berkembang menyelaraskan perkembangan zaman.

Transformasi sistem nilai juga diungkapkan secara menarik oleh Johnson yang mendefinisikan revolusi sebagai penjungkirbalikan atau perubahan nilai-nilai sosial di masyarakat. Johnson dalam Skocpol (1991:9) revolusi didefinisikan dan dijelaskan oleh Johnson berdasarkan model sistem sosial yang terkoordinasi melalui nilai. Kekerasan dan perubahan sosial, kata Johnson, adalah sifat dari revolusi. Menciptakan revolusi berarti menerima kekerasan untuk mengubah sistem, lebih tepatnya, revolusi adalah implementasi dari suatu strategi kekerasan yang ditunjukkan untuk mendorong timbulnya perubahan dalam struktur sosial. Apabila mereka berhasil, yang diubah oleh revolusi terutama adalah inti orientasi nilai masyarakat yang bersangkutan.

Lebih jelasnya, situasi revolusioner menyelaraskan kembali nilai-nilai dengan lingkungan. Revolusi akan muncul sebagai upaya untuk melakukan perubahan sistemik dengan cara kekerasan. Ketika sistem sosial atau nilai dan lingkungan mengalami ketidakharmonisan yang serius, maka masyarakat akan mengalami disorientasi dan membuka peluang bagi nilai-nilai alternatif yang diusulkan oleh gerakan revolusioner.

Untuk menganalogikan, bak kuatnya hubungan cinta antara Simone de Beauvoir dan Sartre, revolusi dan perubahan sosial juga tidak bisa tidak demikian. Sztompka (2004:357) menjelaskan bahwa revolusi sebagai bentuk perubahan sosial. Revolusi adalah wujud perubahan sosial paling spektakuler sebagai tanda perpecahan mendasar dalam proses historis; pembentukan ulang masyarakat dari dalam dan

pembentukan ulang manusia. Revolusi menutup epos lama dan membuka epos baru. Jadi bagai ledakan sebuah dinamit, revolusi membisingkan telinga masyarakat untuk bereaksi melakukan transformasi. Kaum revolusioner bersama masyarakat seakan lahir kembali dan membentuk perubahan-perubahan di dalam masyarakat sebagai tujuan langkah-langkah radikalnya.

Pengaruh sosial yang dihasilkan revolusi bertujuan agar tatanan masyarakat bergerak lebih baik dari sebelumnya. Adanya perbaikan hidup setelah revolusi karena revolusi melahirkan perubahan sosial. Dalam kaitannya dengan Revolusi Prancis Mei 1789, tentu tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat adalah adanya perubahan baik dalam bidang politik, bidang pendidikan, maupun pada sistem nilai yang dirasa terlalu ortodoks mengikuti sistem gereja.

Tentang teori perubahan sosial, Bungin (2008:91) mendeskripsikan bahwa perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, dimana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial lama kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial yang baru.

Ringkasnya, perubahan sosial terjadi ketika ada kesediaan anggota masyarakat untuk meninggalkan unsur-unsur budaya dan sistem sosial

lama dan mulai beralih menggunakan unsur-unsur budaya dan sistem sosial yang baru. Perubahan sosial dipandang sebagai konsep yang serba mencakup seluruh kehidupan masyarakat baik pada tingkat individual, kelompok, masyarakat, negara yang mengalami perubahan. Hal-hal penting dalam perubahan sosial menyangkut aspek-aspek sebagai berikut, yaitu: perubahan pola pikir masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan perubahan sosial budaya politik (juga pendidikan).

Berpijak pada pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh beberapa pakar di atas mengenai revolusi, maka disimpulkan bahwa revolusi merupakan bagian dari suatu kejadian besar yang terjadi dalam suatu negara karena pemegang kekuasaan tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga mau tidak mau perlu adanya revolusi. Revolusi dengan kekerasan untuk menggulingkan penguasa lama dan membangun kembali masyarakat baru. Revolusi berkobar dari bawah, sebagai akibat dari akumulasi ketegangan, keluhan dan ketidakpuasan yang melampaui ambang batas tertentu.

Konsep revolusi mengacu pada penggunaan gerakan massa atau ancaman paksaan dan kekerasan terhadap penguasa untuk melaksanakan perubahan mendasar dan terus-menerus dalam masyarakat mereka. Revolusi sosial menghasilkan transformasi sosial-struktural yang mendasar yang mengubah nilai-nilai kemasyarakatan dan lembaga-lembaga sosial. Revolusi sosial bertujuan untuk merubah tatanan nilai dalam masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat untuk

mendapatkan kondisi sosial yang lebih paripurna baik di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan dll. Singkatnya, meminjam istilah Soekarno, revolusi menghendaki suatu upaya untuk menjebol dan membangun dari sistem lama kepada suatu sistem yang baru.

A. 2. Gerakan Sosial

Dalam proses bergulirnya revolusi sosial, sering kali terjadi suatu pergerakan massa yang menghimpun dan menyuarakan pesan rakyat. Sebagai wujud “perwakilan rakyat” jalanan, pergerakan ini merupakan usaha untuk memanasifestasikan tuntutannya melalui aksi kolektif. Gerakan sosial ini mau tidak mau menambahkan corak perseteruan atau perlawanan di dalam interaksi sosial. Pertanyaan yang mungkin patut dilontarkan adalah mengapa mereka melawan? sesungguhnya apa yang mereka inginkan dalam perlawanan mereka?.

Pertanyaan tersebut tentu tidak hanya memiliki satu jawaban. Secara khusus mengenai perlawanan, Victor Hugo memberikan perhatian serius bahwa perlawanan adalah suatu pembuktian bahwa manusia itu hidup. Menurutnya bahwa “*vivre c’est lutter* atau *ceux qui vivent, ce sont qui luttent*.” (http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/ceux_qui_vivent_ce_sont_ceux_qui_luttent.html). Artinya, bahwa hidup adalah melawan atau mereka yang hidup adalah mereka yang melawan.

Jika diperhatikan, pernyataan Hugo tidak jauh berbeda dengan apa yang diuraikan oleh Albert Camus “*Je me révolte donc je suis*”

(<http://www.toupie.org/Citations/Camus.htm>) yang artinya, aku berontak maka aku ada. Dengan demikian, “berperang” di sudut-sudut jalan melawan pengekangan kebebasan serta “wajah” otoriterisme merupakan bentuk dari pembuktian bahwa manusia “mengada”.

Sementara itu, Comfort dalam Sheehan (2003:33) menilai bahwa pembangkangan merupakan keharusan moral dalam menghadapi negara yang tidak bertanggungjawab. Perlawanan dan pembangkangan masih tetap merupakan satu-satunya kekuatan yang sanggup mengatasi barbarisme. Dengan kata lain, aksi melawan dianggap sebagai salah satu “senjata” penyelesaian untuk menghentikan ketidakmanusiawian.

Simak cuplikan puisi Wiji Thukul dalam Wilson (2007:2) berikut ini,

“Apabila usul ditolak tanpa ditimbang
Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan
Dituduh subversif dan mengganggu keamanan
Maka hanya ada satu kata : lawan !“

Kutipan di atas diambil dari puisi yang berjudul “peringatan”. Cuplikan karya monumental dari sastrawan jalanan yang dihilangkan oleh penguasa tersebut memperlihatkan bahwa kata **lawan** sendiri memiliki makna yang penting. Dia seakan telah berhasil menemukan alat sebuah simbol perlawanan untuk meraih kebebasan yang sejati.

Pada dasarnya, gerakan sosial merupakan jawaban spontan rakyat terhadap negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan kehendak kenyataan sosial masyarakat. Gerakan ini merupakan implementasi aksi yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat secara kolektif yang

disertai dengan tujuan yang nyata. Contohnya : demonstrasi, kerusuhan, atau bahkan revolusi.

Touraine dalam Montoussé menerangkan gerakan sosial (2008:155) sebagai berikut,

“Un mouvement social est l’action collective organisée par laquelle un acteur de classe lutte pour la direction sociale de l’historicité dans un ensemble historique concret. le mouvement social est à la fois un conflit social et un projet culturel. C’est l’effort d’un acteur collectif pour s’emparer des valeurs, des orientations culturelles d’une société en s’opposant à l’action d’un adversaire auquel le lient des relations de pouvoir.”

Jadi gerakan sosial adalah sebuah aksi sosial yang diselenggarakan secara kolektif yang mana aktor kelas tertentu berjuang untuk tujuan sosial. Gerakan sosial juga merupakan sebuah konflik sosial. Ini adalah upaya kolektif untuk merebut nilai-nilai, orientasi budaya masyarakat.

Lebih lanjut Heberle dalam Basri (2008:14) melihat bahwa konsep gerakan sosial bersifat politis. Gerakan sosial selalu bersifat politis sebab memiliki komitmen untuk mengubah hubungan kekuasaan dari struktur-struktur basis masyarakat. Dengan demikian, gerakan sosial mempersoalkan hubungan kekuasaan di tengah masyarakat. Gerakan ini bisa muncul akibat masalah dominasi politik, kesenjangan masyarakat, dan berujung pada upaya mengakhiri kondisi tersebut.

Dalam gerakan sosial, rakyat tentu mempunyai alasan untuk bergabung dan berjuang untuk menentang orang yang menghalangi mereka mencapai tujuan itu. Perubahan boleh jadi salah satu elemen

penting dalam mendorong terbangunnya sebuah gerakan kolektif. Gerakan sosial ini sering berkaitan erat dengan perubahan struktural mendasar. Hal ini selaras dengan pendapat Bashevkin dalam basri (2008:12) bahwa gerakan sosial sebagai suatu kelompok protes yang memobilisasi pengikutnya dengan metode yang lebih bersifat menantang terhadap sistem. Dalam gerakan sosial, setiap pengikut mengembangkan wacana keterlibatan dalam proses perubahan, yang hasil akhirnya adalah muncul di masyarakat. Bisa disebutkan bahwa bagi Bashevkin, gerakan sosial dapat disebut sebagai praktek mobilisasi massa atas keyakinan yang sama. Massa dengan kolektivitasnya melakukan aksi sosial untuk menentang sistem dan kemudian mengubahnya.

Pendapat Bashevkin seirama dengan Guay dkk (2005:17) yang menyatakan bahwa,

“D’une part, toute action collective, ce qui englobe les mouvements sociaux, est l’expression des revendications, voire des conflits sociaux qui constituent le tissu, la trame sociale de nos sociétés. En effet, l’action collective doit être reliée à la structuration même du social, sous l’angle toutefois de rapports sociaux porteurs non seulement de domination mais, avec leur envers indissociable contribuant aux rapports conflictuels entre adversaires sociaux, de possibilités d’émancipation, d’égalité sociale renouvelées.”

Jadi tindakan kolektif (gerakan sosial) adalah ekspresi suatu tuntutan, bahkan konflik sosial yang merupakan rentetan masalah tentang struktur sosial masyarakat. Sehingga tindakan kolektif juga berkontribusi pada kemungkinan suatu emansipasi, dan kesetaraan sosial baru.

Dalam pembentukan gerakan sosial, kelompok masyarakat berkumpul untuk melakukan aksinya yang “melawan arus” itu. Gerakan tersebut bisa dibentuk dengan organisasi yang matang sebagaimana dituturkan oleh Useem dalam Wiktorowicz (2012:11) bahwa gerakan sosial sebagai tindakan kolektif terorganisasi, yang dimaksudkan untuk mengadakan perubahan sosial.

Hal tersebut diperkuat dengan argumentasi Touraine (dalam Zubir, 2010:31-32) yang menambahkan bahwa gerakan sosial memiliki tiga pola yaitu, pertama, gerakan sosial melambangkan upaya sarat konflik guna mengontrol pola-pola kultural dalam sebuah jenis kemasyarakatan. Kedua, gerakan sosial terorganisir untuk mengontrol perjalanan dari masyarakat ke masyarakat lain. Gerakan terakhir yakni gerakan yang di dalamnya terdapat transformasi nilai-nilai budaya menjadi pertarungan utama. Ketiga pola yang diutarakan oleh Touraine dapat dipersingkat bahwa gerakan sosial adalah suatu gerakan yang diorganisir dengan baik oleh masyarakat dengan tujuan perubahan-perubahan sosial.

Namun di lain pihak, pendapat gerakan sosial berorganisasi yang disebutkan oleh Useem dan Touraine bertentangan dengan Sztompka (2004:325) yang menggolongkan gerakan sosial terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :1). Kolektivitas orang yang bertindak bersama. 2). Tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat mereka yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama. 3). Kolektivitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya daripada

organisasi formal. 4). Tindakannya mempunyai derajat spontanitas relatif tinggi namun tak terlembaga.

Dalam konteks ini, gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat mereka. Upaya kolektif untuk membangun tatanan kehidupan yang baru dan mengungkapkan perasaan tak puas secara kolektif di depan umum serta mengubah basis sosial dan politik yang dirasakan tak memuaskan itu. Hal tersebut disetujui oleh Mirsel dalam Jurdi (2010:141). Menurutnya gerakan sosial merupakan perilaku kolektif suatu pergolakan atau gerakan sosial terjadi karena adanya mobilisasi atas dasar percaya seperti perilaku tak terlembaga, pemberontakan, dan revolusi. Gerakan ini terjadi dengan ditandai adanya kemarahan, keputusasaan dan ketegangan sosial pada level makro dalam masyarakat yang melahirkan gerakan-gerakan emosional yang sedemikian rupa.

Dalam kaitannya Revolusi Prancis Mei 1968, terdapat banyak organisasi sosial terlembaga yang melakukan aksi serangkaian gerakan protes baik dari organisasi mahasiswa maupun organisasi buruh. Namun demikian, dalam kenyataannya, gelombang protes tersebut juga dilakukan secara spontan oleh masyarakat umum yang tidak dalam posisi mewakili suatu organisasi sosial tertentu. Mereka secara sukarela turun ke jalan menuntut apa yang mereka ingin rubah secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang dengan siapa mereka turun ke jalan.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan para ahli, disimpulkan bahwa gerakan sosial merupakan bentuk aksi kolektif dengan tujuan yang jelas yaitu melawan sistem sosial dan politik tertentu. Gerakan sosial ini bisa dalam bentuk organisasi atau bisa dalam lembaga. Gerakan sosial terbentuk ketika banyak orang yang merasa tidak puas dan kecewa atas perlakuan tidak adil, ketimpangan sosial ekonomi pendidikan.

Dengan agenda gerakan yang jelas, tentu akan berhasil merekrut anggota yang banyak dan tujuan dari gerakan itu adalah terjadi perubahan dan cara pandang suatu nilai dalam masyarakat. Perubahan yang diperjuangkan tersebut menyangkut kepentingan umum warga dan menyentuh aspek kehidupan masyarakat termasuk pendidikan. Meskipun demikian, fokus tuntutan gerakan sosial tidak hanya berlingkup pada satu sisi, melainkan cenderung melebar.

A. 3. Gerakan Mahasiswa

Sebagai warga masyarakat yang sedang menempuh proses pendidikan tertinggi, mahasiswa dipandang sebagai kaum intelektual. Mahasiswa mau tidak mau harus mengedepankan kemampuan intelektualnya sebagai proses berpikir dalam memecah kebekuan masalah baik itu masalah sosial, budaya maupun politik. Karena berpikir tak ubahnya seperti “mesin” untuk menyelesaikan masalah serta pembuktian kekuatan natural manusia bahwa ia hidup. Seperti yang ditegaskan René Descartes *“je pense donc je suis”* (<http://la-philosophie.com/philosophie->

descartes) bahwa saya berpikir maka saya ada. Jadi dengan berpikir, seseorang dapat yakin akan eksistensinya di dunia.

Mengenai makna mahasiswa, Sanit (1999:199) menerangkan bahwa seorang mahasiswa adalah individu yang sedang melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka menempuh suatu program pendidikan di perguruan tinggi. Karena itu seorang mahasiswa tidak terpisahkan dari kampus suatu lembaga pendidikan tinggi seperti universitas, institut, sekolah tinggi, dan akademis atau pun politeknik, bersama aktivitas yang ada di dalamnya. Jadi sebagai kaum intelektual, mahasiswa memainkan peran-peran sosial yang mulai dari pemikir, pemimpin dan pelaksana sebagai pemikir mahasiswa telah mencoba menyusun dan menawarkan gagasan-gagasan tentang arah dan proses pengembangan masyarakat.

Sanit dalam Basri (2008:27) melanjutkan bahwa mahasiswa merupakan suatu status sosial tersendiri. Posisi mahasiswa digolongkan ke dalam elit yang baru tumbuh di lingkungan pendidikan. Hal tersebut menggambarkan posisi mahasiswa sebagai warga dari lapisan masyarakat yang seharusnya berpandangan “jeli” terhadap sistem kekuasaan yang dibangun oleh lapisan atas sekaligus memahami dan merasakan penderitaan lapisan bawah.

Gerakan mahasiswa merupakan wujud dari rasa peka terhadap masalah kemasyarakatan sehingga mendorong mereka untuk melakukan perubahan. Sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai pandangan luas untuk dapat bergerak di

antara semua lapisan masyarakat. Maka dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, mahasiswa dapat memobilisasi dan memimpin suatu gerakan sosial.

Mengenai gerakan mahasiswa, Basri (2008:2-3) memandang bahwa gerakan mahasiswa merupakan fenomena umum di negara-negara berkembang. Kelompok masyarakat ini relatif mudah diorganisasikan dan secara politik signifikan terutama dalam pengartikulasian nilai-nilai dan kepentingan dari masyarakat menuju negara. Signifikansi ini paling jelas terlihat dalam konteks rezim-rezim politik otoritarian. Dalam konteks ini, mahasiswa menjadi suatu kelompok yang memecah kebekuan komunikasi politik antara kubu masyarakat dengan negara. Mahasiswa mengartikulasikan promosi nilai-nilai tersebut dalam bahasa politik yang lugas. Tradisi ini berakibat pada hubungan konfrontatif mereka dengan rezim politik, terutama yang bercorak otoritarian.

Dalam hubungannya dengan Revolusi Mei 1968, sebenarnya pasangannya gelombang revolusi disulut oleh angin ribut yang mengelilingi dunia kampus di Paris. Aksi “angkat senjata” para mahasiswa-mahasiswa Paris yang bergerak menuntut kebebasan merupakan awal dari segala kemelut kerusuhan sosial yang melanda Paris dalam berminggu-minggu. Gerakan mahasiswa menggunakan hak politiknya (posisinya sebagai intelektual muda) untuk turut serta menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kampusnya yang kemudian meluas ke urusan politik kekuasaan De Gaulle.

Jadi, dari penjelasan-penjelasan di atas dapat dipersempit bahwa gerakan mahasiswa merupakan gerakan sosial yang dipelopori oleh sejumlah mahasiswa untuk menyuarkan tuntutan-tuntutannya kepada pemerintah. Dalam pergerakannya, seringkali mahasiswa mendapat dukungan dari kalangan masyarakat. Gerakan mahasiswa muncul sebagai perwujudan sikap protes mahasiswa yang dapat dipicu oleh adanya kombinasi antara respon emosional dan intelektual, yang merupakan tanggapan atas situasi sosial di sekeliling mereka.

A.4. Masyarakat

Di belahan dunia mana pun, tidak ada manusia yang hidup sendiri tanpa mengenal satu sama lain. Tidak ada manusia yang hanya makan, tidur, bekerja tanpa melakukan interaksi dengan lainnya. Secara yakin dapat dijelaskan bahwa manusia selalu hidup bersama karena manusia tidak dapat tidak membutuhkan suatu “rumah” interaksi yang dinamakan masyarakat. Dalam bermasyarakat, individu-individu membentuk suatu suatu kelompok yang disebut sebagai masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana diungkapkan Raharjo (2009:59) bahwa masyarakat menunjuk pada semua tempat dimana individu berkumpul bersama.

Lebih dalam lagi, Maclver dan Page dalam Soekanto (2012:22) mengemukakan bahwa masyarakat ialah suatu dari sistem kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan

manusia. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah. Dengan kata lain, masyarakat merupakan kelompok manusia yang dinamis yang hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Masyarakat memiliki suatu aturan tertentu yang dibuat, disepakati dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri.

Berbicara tentang masyarakat, Supardan (2007:150) menguraikan pendapatnya sendiri bahwa pada hakikatnya, masyarakat itu dapat diibaratkan sebuah sistem, dimana di dalamnya terdiri atas beberapa unsur atau elemen (lembaga-lembaga sosial) yang memiliki fungsinya masing-masing dan saling memiliki keterkaitan antar unsur tersebut dalam berproses untuk mencapai suatu tujuan. Dengan begitu, jelaslah bahwa masyarakat adalah beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan membentuk sistem sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sebab individu-individu tersebut tidak dapat hidup dalam keterpencilan dengan mengelak kodratnya sebagai makhluk sosial.

Manusia seakan mempunyai kesadaran sosialnya bahwa hidup tidak dapat dijalankan secara individual juga dijelaskan oleh *Berthoud dan Busino* (1991:200) bahwa "*L'homme n'a pas été fait pour vivre seul, mais pour être en société avec ses semblables. En plus loin, hors de la société il n'y a que souci et férocité.*" Dengan kata lain, manusia tidak hidup

secara sendiri, tetapi hidup bermasyarakat bersama dengan lainnya karena tanpa sistem masyarakat akan timbul suatu kecemasan dan kekacauan.

Sebagai makhluk sosial yang berkumpul bersama dan melakukan simbiosis mutualisme juga dapat dikaitkan dengan fenomena Revolusi Mei 1968. Masyarakat tersebut secara bersama-sama menyatakan senasib dan seperjuangan dalam memperjuangkan perubahan-perubahan dalam bidang sosial. Sifat khas kemasyarakatan terlihat dengan adanya jalinan pikiran mereka yang sebelumnya individual menjadi sosial. Hal itu bisa dibuktikan dengan turunnya mereka ke jalan bersama-sama menuntut perbaikan-perbaikan sosial.

Dari teori-teori di atas, maka masyarakat ialah suatu jalinan hubungan sosial antar manusia dalam suatu wilayah tertentu. Kumpulan dari manusia ini kemudian menghasilkan suatu sistem kebiasaan dan tata cara yang khas. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia, timbulah suatu kebudayaan yang akhirnya mengikat setiap anggota masyarakat.

A.4. Pendidikan dan Universitas

Pendidikan merupakan unsur pembeda antara manusia dan binatang karena menurut Tilaar dan Nugroho (2008:23) hanya manusialah yang merupakan makhluk yang memerlukan pendidikan. Tanpa pendidikan, manusia tidak mungkin menjadi manusia atau mewujudkan kemanusiaannya. Artinya sebagai makhluk paripurna yang berpikir dan

berbudaya, manusia mempunyai tugas untuk mengembangkan akhlak mulia (religius), kebudayaan, serta menjadi pribadi yang terampil dan produktif.

Oleh karena itu, dalam bermasyarakat, untuk mengembangkan potensinya baik kognitif maupun afektif, manusia tidak dapat tidak memerlukan pendidikan. Morin dan Brunet (2005:13) mendefinisikan pendidikan sebagai berikut, *“Plus généralement, l’éducation comme ‘l’action d’élever un enfant, un jeune homme –habitudes manuelles, intellectuels, qualités morales, physiques.’* Dengan demikian, pendidikan adalah suatu bentuk perlakuan dalam rangka mendidik manusia baik kebiasaan, kepandaian otaknya, moral mau pun fisiknya. Namun pengertian pendidikan tidaklah sesederhana itu khususnya dalam kaitannya dengan relasi sosial, Freire menjelaskan pendidikan secara khas oleh Freire sebagai berikut.

Freire (2000:64) meyakini bahwa pendidikan sebagai praktek pembebasan –berlawanan dengan pendidikan sebagai praktek dominasi- menolak anggapan bahwa manusia adalah sesuatu yang abstrak, terpencil, berdiri sendiri, dan tidak terikat pada dunia; ia juga menolak anggapan bahwa dunia mengada sebagai sebuah realitas terpisah dari manusia. Jelas, Freire lebih menginginkan pendidikan menjadi alat pemerdekaan dari berbagai penindasan. Ia tidak menginginkan pendidikan yang membentuk manusia menjadi “manusia bentukan” tetapi sebaliknya, menjadi “manusia merdeka dan memerdekakan”.

Apa yang dipaparkan oleh Freire juga selaras dengan Kartono (1991:7) yang menyatakan bahwa pendidikan sejati itu merupakan upaya yang sistematis untuk pembebasan yang permanen dari macam-macam keterbelakangan, kebodohan, kesengsaraan, penindasan, dan lain lain, sehingga individu bisa menjadi pribadi yang memiliki kesadaran diri, tahu akan martabat dan penentuan tempatnya, mampu bertanggung jawab, mandiri, ringkasnya bisa menjadi manusia utuh. Dengan demikian Kartono menganggap bahwa pendidikan itu bisa dipakai sebagai alat untuk mengikis habis segala bentuk penindasan yang dalam fakta sosialnya dapat menyerupai kemiskinan, kebodohan, ketidaksetaraan, pengekangan kebebasan, dan lain-lain.

Hal tersebut sejalan dengan Soedjatmoko dalam Putra (1993:37) yang secara lebih luas menegaskan bahwa tugas pendidikan untuk membina kemampuan-kemampuan tersebut yang harus dimiliki oleh manusia sebagai bekal untuk membangun diri. Melalui pembinaan kemampuan itu diharapkan terjadi peningkatan kecerdasan seluruh bangsa. Dengan kata lain, pendidikan bertujuan, secara mikro, untuk pembinaan tiap individu sehingga memiliki suatu keahlian tertentu yang dapat berguna untuk kelangsungan hidupnya. Dan secara makro pendidikan menjalankan peran yang vital dalam pembangunan suatu negara.

Pendidikan juga penting untuk menghadapi tantangan di masa depan dan berbagai permasalahannya seperti yang diuraikan oleh Delors (1998:13) bahwa,

“Face aux multiples défis de l’avenir, l’éducation apparaît comme un atout indispensable pour permettre à l’humanité de progresser vers les idéaux de paix, de liberté et de justice sociale. Comme une voie, parmi d’autres, certes, au service d’un développement humain plus harmonieux, plus authentique, afin de faire reculer la pauvreté, l’exclusion, les incompréhensions, les oppressions, les guerres”

Bahwa untuk menghadapi tantangan masa depan, pendidikan muncul sebagai sebuah langkah penting dalam rangka memajukan kemanusiaan yang ideal yaitu kedamaian, kebebasan dan keadilan sosial. Sebagai sebuah jalan dalam perkembangan kehidupan yang lebih harmonis dan selaras sehingga dapat menurunkan kemiskinan, diskriminasi, kesalahpahaman, penindasan, dan perang. Dengan kata lain, pendidikan memiliki peran sangat penting karena dapat membentuk suatu masyarakat yang damai, maju, dan bebas (sesuai hukum).

Sedangkan Mudyahadrjo (2008:49-50) menjelaskan bahwa dalam arti sempit, pendidikan adalah dunia sekolah atau persekolahan. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal sebagai salah satu hasil rekayasa dari peradaban manusia. Sekolah sebagai hasil rekayasa manusia diciptakan manusia untuk menyelenggarakan pendidikan, dan penciptaannya berkaitan erat dengan penguasaan bahasa tertulis dalam masyarakat, yang berkembang makin sistematis dan meningkat. Pendidikan tidaklah

berlangsung seumur hidup, tetapi berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, (Ivan Illich menyebutkan "*age-specific*"). Masa pendidikan adalah masa sekolah yang keseluruhannya mencakup masa belajar di Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi.

Jadi pada hakikatnya, pendidikan mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai suatu usaha untuk mentransformasikan segala nilai baik religi, budaya, sains dan teknologi, seni, dan nilai keterampilan. Pendidikan berlangsung dalam lingkungan pendidikan yang diciptakan khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Secara teknis pendidikan berlangsung di kelas. Isi pendidikan tersusun secara terprogram dalam bentuk kurikulum.

Isu pendidikan adalah suatu pintu utama menuju jembatan yang mengantarkan kepada peristiwa Revolusi Prancis Mei 1968. Masalah pendidikan awalnya diangkat oleh sekelompok mahasiswa di ruang lingkup universitas (Perguruan Tinggi) yang menganggap bahwa adanya sistem dunia kampus yang "tidak sehat". Yang kemudian aksi protes tersebut tidak hanya mandek di tingkat universitas (dunia pendidikan) saja namun juga menjalar ke masalah sosial.

Universitas adalah salah satu penopang pendidikan. Indrajit dan Djokopranoto menjelaskan bahwa universitas merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi selain akademi, institut, politeknik dan sekolah tinggi. Universitas terdiri atas sejumlah fakultas yang

menyelenggarakan pendidikan akademik pada sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain-lain (2006:4-5).

Universitas berkembang untuk memajukan masyarakat dengan memerlukan interaksi yang lebih intens antara lembaga universitas dengan masyarakat. Universitas memiliki mempunyai tugas untuk mentransfer nilai-nilai baru sesuai dengan perkembangan di masyarakat (Luddin, 2012 :37-38). Jadi masih menurut Luddin (2008 :89) universitas adalah lembaga pendidikan dan peradaban.

Tujuan diselenggarakannya universitas adalah menyiapkan generasi baru agar mempunyai kualitas akademik dan intelektual yang baik sehingga dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyiapkan calon-calon pemimpin masa depan yang berwawasan luas. (Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional, 2003:45). Dengan demikian, universitas tentu memainkan peran yang vital dalam tatanan suatu negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa universitas adalah salah satu dari bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari beberapa fakultas, dan fakultas terpecah menjadi jurusan. Universitas ini bertujuan untuk membangun karakter dan intelektual para mahasiswanya agar bermanfaat di masyarakat.

B. Sintesis Teori

Setelah memaparkan dan menganalisis teori-teori yang berbeda bahkan bertentangan satu sama lain, tanpa mengenyampingkan teori lain, peneliti menetapkan sintesis teori.

Revolusi merupakan perlawanan besar yang dimulai dari perlawanan kecil dan terpisah-pisah. Lebih jelasnya, Luxemburg (2000:125) menjelaskan bahwa revolusi adalah cara yang lebih cepat serta lebih radikal dengan kekerasan untuk mendapatkan kemajuan sosial.

Revolusi di Prancis berhubungan erat dengan dunia pendidikan. Mudyahadrjo (2008:49-50) menjelaskan bahwa dalam arti sempit, pendidikan adalah dunia sekolah atau persekolahan. Persekolahan (termasuk universitas) adalah lembaga pendidikan formal sebagai salah satu hasil rekayasa dari peradaban manusia yang bertujuan untuk membawa generasi muda pada suatu kemajuan sosial. Pendidikan tidaklah berlangsung seumur hidup, tetapi berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas yaitu masa sekolah yang keseluruhannya mencakup masa belajar di Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi.

Gerakan mahasiswa merupakan sebuah aksi sosial sekelompok mahasiswa yang dilakukan secara kolektif untuk mencapai suatu tuntutan perubahan tertentu dalam masyarakat. Tujuan dari gerakan ini memaksa pemerintah selaku pemegang otoritas agar bersedia mengubah atau

melakukan suatu kebijakan baru yang dianggap sesuai dengan tuntutan para mahasiswa.

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta fokus dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Revolusi “Gerakan Mahasiswa Prancis Mei 1968” dan pengaruhnya di bidang pendidikan khususnya universitas di Prancis. Oleh karena itu, data dari beberapa buku rujukan yang menyangkut kronologi atau proses terjadinya Revolusi “Gerakan Mahasiswa Prancis Mei 1968” dan pengaruhnya bagi Universitas Prancis tersebut akan dijadikan acuan penulisan pada hasil penelitian.

Kemudian prosedur penelitian dilakukan berdasarkan metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:17) yaitu analisis isi. Analisis isi ini terdiri dari tiga tahap, yaitu 1). Pereduksian data. 2). Penyajian data dan 3). Penarikan kesimpulan. Pereduksian data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian atau penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Kemudian penyajian data adalah proses menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan membatasi suatu sekumpulan informasi dari berbagai tulisan yang disusun dengan klasifikasi tertentu. Yang terakhir penarikan kesimpulan yaitu proses penghubungan suatu data dengan data lainnya sehingga mudah untuk dilakukan suatu penarikan kesimpulan (Miles&Huberman, 1992 :16-19).

Berikut adalah contoh tabel data untuk Pengaruh Revolusi “Gerakan Mahasiswa” di bidang Pendidikan (universitas) dari tahun 1968-1971.

Tabel 2. Pengaruh Revolusi “Gerakan Mahasiswa” di bidang Pendidikan (universitas) dari tahun 1968-1971.

No	Waktu	Peristiwa	Kata Kunci	Sumber & Pengarang	Tahun Terbit & Halaman

Moleong (1994:178) menjelaskan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain atau yang sering disebut triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan

mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui; 1. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 2. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Jadi dapat dipahami bahwa triangulasi berguna untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah suatu kebenaran. Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Dosen Bahasa Prancis UNJ sekaligus pengajar senior IFI Wijaya, Drs. Sulandri Nuryadin, M.Pd dengan tema sesuai penelitian ini yaitu Revolusi "Gerakan Mahasiswa Prancis Mei 1968" dan pengaruhnya di bidang pendidikan (universitas). Hasil wawancara dengan sumber ahli tersebut dilampirkan pada bagian lampiran. Hasil wawancara dengan sumber ahli tersebut dilampirkan pada bagian lampiran.

Tahap yang terakhir yaitu pada tahap **penarikan kesimpulan**, yaitu dilakukan pembahasan dari setiap peristiwa yang terdapat dalam tabel analisis data. Pada tahap ini, dideskripsikan secara detail dan mendalam dari akar sampai akhir Revolusi "Gerakan Mahasiswa Prancis Mei 1968" dan dideskripsikan pula pengaruh dari setelah Revolusi tersebut berakhir terhadap bidang pendidikan khususnya universitas-universitas di Prancis.